

## PELABUHAN-PELABUHAN TRADISIONAL DI PULAU AMBON DAN EKSISTENSINYA BAGI MASYARAKAT MALUKU

Rina Pusparani, Muhammad Ramdhani Kilkoda, Alfia Pirasou

\*Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura, Ambon

\*Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura, Ambon

\*Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura, Ambon

### ARTICLE INFORMATION

Submitted : 18 Oktober 2021  
Review : 22 Oktober 2021  
Accepted : 27 Oktober 2021  
Published : 31 Oktober 2021  
Available Online : 1 November 2021

### KEYWORDS

Kata Kunci: Pelabuhan, Tradisional, Mobilitas Sosial

### CORRESPONDANCE

E-mail: [puspa\\_rina@yahoo.com](mailto:puspa_rina@yahoo.com), [Gosen33lala@gmail.com](mailto:Gosen33lala@gmail.com),  
[alfiapirasou635@gmail.com](mailto:alfiapirasou635@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini berjudul Pelabuhan-Pelabuhan Tradisional Di Pulau Ambon Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Maluku. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana perkembangan Pelabuhan-pelabuhan tradisional Pulau Ambon? Dan Sejauh mana eksistensi pelabuhan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kegunaan Penelitian ini untuk mengaplikasikan untuk mengaplikasikan kajian sejarah Maritim dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Dengan menggunakan pendekatan perkembangan dan mobilitas sosial, sehingga akan lahir karya sejarah yang tidak hanya bersifat deskriptif-naratif tapi juga analisis-struktural. Diharapkan juga penelitian ini berguna bagi pengayaan historiografi Maluku yang masih relatif sedikit. Secara praktis, penelitian ini akan berguna, terutama bagi praktisi pemerintahan dan para pembuat kebijakan, khususnya di Pemerintahan daerah yaitu dinas yang terkait., juga untuk pemerintahan negeri khususnya dan di Wilayah Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, juga untuk masyarakat Masyarakat Kota Ambon umumnya, Melalui kajian tentang perkembangan dan perubahan masyarakat, nantinya bisa mengambil langkah dan kebijakan untuk kemajuan masyarakat kedepan yang lebih baik tanpa menghilangkan kearifan lokal.

### A. Pendahuluan

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Crane dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak

pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana

penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. (Triatmodjo, 2009).

Maluku merupakan daerah kepulauan yang dikenal oleh dunia sebagai penghasil rempah-rempah turut mempunyai andil penting dalam sejarah perdagangan internasional kala itu. Hal ini di jelaskan oleh Tome Pires dalam bukunya *The Suma Oriental of Tome Pires* "pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala dan Maluku untuk Cengkih dan barang perdagangan ini tidak dikenal di lain- lain tempat di dunia kecuali di tempat-tempat yang disebutkan tadi (Paramita, R. Abdurrachman, dkk 1973 : 50).

Menurut Pusparani dan Nanlohy, (2016 : 6) Berbicara mengenai sejarah perdagangan, maka tidak terlepas kaitannya dengan perdagangan lintas laut, kecuali jika perdagangan itu terbatas pada wilayah daratan. Ini pun biasanya melalui jalur laut juga, oleh karena pusat-pusat pemerintahan sekaligus pusat-pusat perdagangan cenderung tumbuh dan berkembang di daerah-daerah pesisir atau di muara-muara sungai, sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan melalui laut. Pada prosesnya, perdagangan lintas laut tidak terlepas dari peran penting faktor-faktor yang menunjangnya, salah satu diantaranya yaitu pelabuhan. Peranan penting pelabuhan bukan sekedar sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal, melainkan juga sebagai tempat berkumpul dan berdagang. ( Thalib, 2014:19)

Maluku sebagai salah satu daerah kepulauan yang juga merupakan wilayah yang termasuk dalam jalur perdagangan rempah kala itu juga tidak terlepas dari peranan penting pelabuhan-

pelabuhan lautnya antara lain, yaitu pelabuhan Tulehu, pelabuhan Hitu yang ikut mempunyai andil dalam sejarah sebagai bandar dagang, tempat keluar-masuknya kapal-kapal, dan penghubung jalur rempah-rempah pada saat kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Maluku. Menurut Amrullah dan Bambang (2016 : 129), Kala itu, Hitu sudah merupakan bandar besar yang ramai dikunjungi saudagar dari berbagai tempat di Nusantara. Oleh karena itulah Hitu menjadi pusat penyebaran Islam pada daerah sekitarnya pada 1500.

Secara fisik pelabuhan merupakan pertemuan antara kawasan lautan dan daratan. Secara sosial budaya merupakan pusat pertemuan orang-orang yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda-beda. Tentu saja pentingnya pelabuhan bukan terutama hanya karena sifat khususnya sebagai pusat interaksi. Interaksi itu sendiri baru merupakan awal dari suatu proses sosial yang dapat membawa pengaruh pada perubahan-perubahan. Sesungguhnya setiap bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam setiap pusat aktifitas manusia, memiliki potensi untuk mendorong perubahan, tetapi pelabuhan, khususnya bila dibandingkan dengan pusat-pusat pemukiman di pedalaman, memiliki potensi yang lebih besar. Disebabkan karena sifat khusus inilah pelabuhan memiliki peranan yang besar dalam sejarah umat manusia (Raharjo dalam Leirisa, ed. 1997 : 29). Secara ekomoni, pelabuhan merupakan bagian dari rantai perdagangan lewat laut (*Sea-borne trade*) (Tukan, 2015 : 36).

Pertumbuhan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Ambon ini mengalami kemajuan pesat pasca kerusuhan Ambon 1999. Diantaranya Pelabuhan

Hitu, Pelabuhan Tehoku negeri Hila dan Pelabuhan Tulehu. Untuk Tulehu Ada dua pelabuhan besar yang terdapat di dalam negeri tulehu yaitu pelabuhan yang terletak di dalam kampung negeri Tulehu yang disebut pelabuhan tulehu dalam dan pelabuhan kedua yaitu pelabuhan terletak di Dusun Hurnala yang dikenal dengan pelabuhan Hurnala yang melayani kapal-kapal dari Pulau Seram, Pulau-Pulau Lease dan kepulauan Banda.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat ini bukan hanya pada masa kekinian saja untuk negeri tulehu perubahan ini terus berlangsung seiring perkembangan sarana prasarana kelautan seperti pelabuhan, perkapalan, pelayaran, transportasi darat dan bidang perdagangan. Salah satu contoh nyata terjadinya perubahan yaitu dalam penggunaan Bahasa daerah oleh masyarakat tulehu dimana masyarakat usia muda sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Jika mereka berbicara dengan orang tua-tua (50 tahun keatas) mereka paham dengan Bahasa daerah yang diucapkan tapi untuk menjawab mereka (anak Muda) tidak menggunakan Bahasa daerah lagi melainkan Bahasa melayu Ambon.

Dari permasalahan diatas menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam tentang perkembangan pelabuhan-pelabuhan di pesisir pulau ambon dan perannya bagi masyarakat Maluku. Sehingga bisa dilihat mobilitas masyarakat bagi perkembangan negeri tempat pelabuhan itu berada. Dengan adanya interaksi antara pendatang dengan penduduk negeri akan menimbulkan banyak perubahan bagi negeri tersebut.

Dari uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain Bagaimana perkembangan Pelabuhan-pelabuhan tradisional Pulau Ambon? Dan Sejauh mana eksistensi pelabuhan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat?. Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoretis-akademis dan kegunaan praktis. Secara teoretis-akademis penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan pendekatan ilmu sosial, ekonomi dan budaya bagi penelitian sejarah. Pendekatan sosial, ekonomi dan budaya sangat diperlukan dalam penelitian sejarah, apalagi sejarah lokal, sehingga akan lahir karya sejarah yang tidak hanya bersifat deskriptif-naratif tapi juga analisis-struktural. Diharapkan juga penelitian ini berguna bagi pengayaan historiografi Maluku yang masih relatif sedikit.

Secara praktis, penelitian ini akan berguna, terutama bagi praktisi pemerintahan dan para pembuat kebijakan, khususnya di dinas perhubungan, juga untuk pemerintahan negeri. Melalui kajian tentang perkembangan dan perubahan masyarakat, nantinya bisa mengambil langkah dan kebijakan untuk kemajuan masyarakat kedepan yang lebih baik.. Manfaat-manfaat penelitian tersebut nantinya akan diwujudkan dalam target capaian tahunan pada tahun pertama berupa proses pembuatan kebijakan untuk tingkat lokal.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara

itu menurut ( Usman dan Akbar 2003 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka cara ataupun teknik yang digunakan yaitu dengan *purposive sampling*. Maka dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Jogiyanto HM ( 2008 : 76 ) dimana dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) tertentu atau jatah (*quota*) tertentu.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan menemukan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, Sugiyono (2011 : 224). Oleh karena itu teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah, *pertama*, Observasi. Sebagaimana yang diungkapkan Hadari Nawawi dan Martini Hadari ( 1995:74 ) dapat diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala pada objek penelitian”. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. *kedua*, Wawancara. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan informan ataupun narasumber, berkaitan dengan masalah yang ingin dicapai, dan dalam wawancara harus berkonsentrasi penuh agar hasilnya memuaskan.

Selain itu wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari informan. Yang menjadi objek wawancara merupakan para pejabat pemerintah negeri dan tokoh masyarakat serta pengguna pelabuhan, yang mengetahui dan menggunakan sarana pelabuhan tersebut. Wawancara adalah dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Moleong ( 2004 : 186 ).

Validitas atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan instrumen untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkannya. Dari sudut instrumen, pengukuran adalah kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang hendak diukurnya secara tepat dan benar, (Nawawi dan Hadari 1995 : 178 ). Pertama. Triangulasi sumber data Digunakan adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, Triangulasi teori yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber teori-teori yang berbeda. Ketiga, Triangulasi peneliti artinya dimana penulis membaca dan menelusuri karya-karya tulis dari beberapa peneliti, yang dianggap mirip dengan tema yang penulis teliti guna melengkapi dan memperkuat data penelitian dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya

(Sugiyono, 2011 : 274).

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pelabuhan-Pelabuhan Di Pulau Ambon**

##### **1. Pelabuhan Negeri Tulehu**

Negeri Tulehu yang berfungsi sebagai penghubung Kabupaten Maluku Tengah (Masohi) dan kota-kota kecamatan lain di Pulau Lease dan Seram secara langsung merupakan suatu kebanggaan Masyarakat Negeri Tulehu sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi contoh bagi warga masyarakat desa lainnya. Geografi Provinsi Maluku berupa kepulauan memperlihatkan kebutuhan sarana perhubungan dan transportasi, untuk membangun komunikasi guna menjalin dan mengembangkan interaksi masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam membangun jaringan dan jalinan tersebut maka peranan angkutan laut menjadi penting. Selain itu, kelancaran lalu lintas angkutan laut yang lebih efisien juga penting untuk menopang perekonomian daerah. Oleh Karena itu Negara atas hak hukum demi menjaga keselamatan masyarakat maka dasar hukum yang mengatur hubungan antar antar pulau lahir UU no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran "pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim." Oleh karena itu, angkutan perairan meliputi kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Jenis angkutan di perairan meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan. Adapun

angkutan Laut dirinci menjadi angkutan dalam negeri, luar negeri, khusus, dan pelayaran- rakyat. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperaian, Pelayaran rakyat juga telah berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah teluk dan pulau-pulau untuk mendistribusikan barang hasil bumi dan jasa, maupun untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat.

Negeri Tulehu merupakan bagian dari wilayah kepulauan yang merupakan bagian kecil dari wilayah seribu pulau, maka transportasi laut yang berlabuh diperaian negeri Tulehu, baik bagi pengembangan di dalam maupun antar wilayah. Pengembangan antar wilayah ditujukan untuk mengembangkan interaksi antar wilayah Maluku diantaranya Masohi kota kabupaten Maluku tengah, seram bagian barat, seram bagian timur dan pulau-pulau lease. Untuk itu jaringan transportasi laut harus dapat mempromosikan pengembangan intra wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan hubungan antar pulau dan sebagai upaya pemerataan pembangunan antara wilayah maju dengan yang masih terbelakang. Sebagai daerah yang memiliki luas laut yang begitu besar maka diperlukan sarana kegiatan penghubung yaitu pelabuhan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan jasa Masyarakat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal

bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar mode transportasi.

Pelabuhan biasanya memiliki alat alat yang dirancang khusus untuk melakukan aktifitas bongkar/ muat kapal yang sedang berlabuh. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 51 tahun 2015, yang mendefinisikan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan Perkembangan suatu wilayah dapat terwujud, jika didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan raya, terminal, listrik, telepon, pelabuhan laut, dan juga Bandar udara. Keberadaan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan interaksi sosial dan kelangsungan sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap interaksi sosial dan keadaan ekonomi suatu wilayah serta akan memacu kemajuan dan perkembangan suatu wilayah.

Perkebangan transportasi laut banyak mengalami Perubahan kondisi pelayaran rakyat yang terjadi di kabupaten Maluku Tengah antara lain model angkutan laut yang digunakan. Menurut informan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, perubahan mulai terjadi sekitar tahun 2015. Pada

masa sebelumnya, sarana angkutan laut untuk menyeberang dari pulau Ambon ke pulau-pulau lain di sekitarnya dan sebaliknya dari pulau lain ke pulau Ambon, menggunakan kapal kayu. Pada tahun 1980 an, di pelabuhan Tulehu masih terdapat 4 buah kapal kayu yang melayani rute Haria (Saparua) – Tulehu, yaitu KM Los Angeles, KMCalifornia, KMLautMegadanKMMatahari. Dalam perkembangannya, pada saat penelitian dilakukan kapal kayu yang ada, khususnya kapal penumpang yang masih ada di pelabuhan Tulehu hanya satu, yaitu KM Matahari milik pengusaha Saparua, yang melayani rute pulau Saparua (pelabuhan Haria) ke pulau Ambon (pelabuhan Tulehu). Kapal tersebut berbobot 34 GT dengan kapasitas 150 orang penumpang. Tetapi pada hari hari biasa penumpang yang ada hanya antara 30 – 50 orang saja. Penumpang penuh pada hari-hari tertentu seperti menjelang hari raya atau natal, bisa mencapai 200 orang dan barang. Kapal kayu yang lain satu persatu hilang dari peredaran, seperti kapal California terbakar tahun 2000- an, kapal Los Angeles dan Laut Mega dijual setelah beroperasinya kapal cepat.

KM Matahari ini masih bertahan, menurut pengakuan pemiliknya karena kondisinya masih bagus dan meskipun hasilnya kadang tidak memadai tetapi keberadaannya masih disenangi oleh masyarakat pengguna. Kokohnya kapal Matahari tersebut karena bahan yang digunakan untuk bahan baku *body* benar-benar dari kayu pilihan, yaitu jenis *matila*, kayu pohon *palaka* dan kayu hitam. Kayu untuk pembuatan kapal tersebut diambil dari pulau Seram dan tidak dicampur dengan jenis kayu lain yang kurang

baik kualitasnya. Menurut penjelasan seorang nakhoda, kapal kayu masih disenangi penumpang karena tidak terlalu oleng pada saat dihantam ombak. Penumpang kapal matahari pada umumnya terdiri dari pedagang dari Saparua yang membawa hasil kebun seperti durian, kelapa, cengkih, pala, alpukad, keladi, dan sagu lempeng untuk di jual di pasar Ambon.

Tabel 1  
Kapal Pelayaran Rakyat Yang Berlabuh di Pelabuhan Tulehu

NO	Nama Kapal	GT	Pelabuhan Asal	Rute	Jenis Muatan
1.	KM. Matahari	34	Haria	Tulehu PP	Penumpang
2	Klm Firman Jy	34	Banda	Tulehu PP	Barang
3	Klm Karya sejati	90	Namlea	Tulehu PP	Barang

Sumber : *Pegawai Sahabandar Pelabuhan Tulehu. Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Tulehu.*

Selain kapal-kapal tersebut juga terdapat jenis *speedboat* yang bersandar di beberapa pelabuhan khusus *speedboat*, antara lain di Mamongke dan pelabuhan Tulehu Lama. Sebagian besar pemilik *speedboat* tersebut adalah orang Saparua. Mayoritas *speedboat* yang ada berukuran kecil yaitu berkapasitas penumpang 7 orang, dan hanya beberapa saja yang kapasitasnya sampai 20 orang di pelabuhan tersebut terdapat lebih dari tiga ratus *speedboat* yang tambat, yang siap melayani penumpang yang akan menyeberang ke Nusalaut, Haruku dan Saparua. Namun setelah adanya kapal cepat ke Saparua, keberadaan *speedboat* di pelabuhan tersebut sngat berdampak, dan *speedboat* tersebut masih beroperasi seperti biasa dan tersebar pada berapa pelabuhan. Diantaranya

pelabuhan Tulehu lama terdapat 3 pelabuhan, Pelabuhan Kampung Tengah, pelabuhan Mamokeng di mamokeng terdapat tiga Pelabuhan. Pelabuhan tersesebut dikelola oleh pemerintah daerah dan Organisasi Masyarakat dan perorangan.

Table 2  
Speedboat Berlabuh Di Pelabuhan Tulehu Milik Perorangan dan Organisasi Buruh

NO	Negeri Asal	GT	Jumlah	Rute	Jenis Muatan
1.	Rohmoni	7	26	Tulehu PP	Penumpang
2	Kabau	7	17	Tulehu PP	Penumpang
3	Pelau	6-7	24	Tulehu PP	Penumpang
4	Wasu	7	7	Tulehu PP	Penumpang
5	Aboru	7	13	Tulehu PP	Penumpang
6	Samet	7	8	Tulehu PP	Penumpang
7	Oma	7	12	Tulehu PP	Penumpang
8	Hulaliu	7	6	Tulehu PP	Penumpang
9	Nusalaut	7	5		
Jumlah			118		

Sumber : Petugas UPT Pos Piket Pelabuhan Mamokeng.

Tabel 3  
Speedboat Berlabuh Di Pelabuhan Tulehu Milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah

NO	Negeri Asal	GT	Jumlah	Rute	Jenis Muatan
1.	Kulur	7	2	Tulehu PP	Penumpang
2	Haria	7	56	Tulehu PP	Penumpang
3	Kamariang	6-7	2	Tulehu PP	Penumpang
4	Kailolo	6-7	80	Tulehu PP	Penumpang
5	Porto	7	11	Tulehu PP	Penumpang
6	Haruku	7	36	Tulehu PP	Penumpang
Jumlah			187		

Sumber : Petugas UPT Pos Piket Pelabuhan Mamokeng dan Tulehu Dalam.

Dalam pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah dan perorangan serta organisasi, pengelolaan oleh perorangan dikarenakan pelabuhan tersebut dibangun oleh perorangan dan organisasi sedangkan yang dikelola oleh pemerintah karena pelabuhan tersebut dibangun

oleh perintah daerah Maluku Tengah. Sehingga pendapatan yang masuk diperuntukkan kepada perintah daerah dan perorangan serta organisasi buruh. Model seperti ini maka pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan mengelola pelabuhan, kecuali memiliki dana untuk membangun pelabuhan sendiri. Akan tetapi, oleh karena pemerintah kabupaten tidak mampu membangun infrastruktur pelabuhan di wilayahnya, maka pemerintah pusat belum menyerahkan mandat dan tanggungjawab pengelolaan pelabuhan lokal kepada pemerintah daerah, disamping alasan lain seperti kualitas SDM di bidang kepelabuhanan yang dianggap belum siap.

Kewenangan daerah untuk mengelola kawasan pelabuhan juga ditentukan oleh ukuran tonase kapal laut yang bersandar di pelabuhan tersebut. Kapal di atas 30 GT misalnya, pengelolaannya dilakukan oleh kantor UPP Tulehu. Sedangkan kapal-kapal kecil dibawah 30 GT menjadi wewenang daerah. Oleh sebab itu, pelabuhan bersandar kapal besar dan kecil selalu beda lokasinya, meskipun lokasi berdekatan. Selain dermaga kapal besar terdapat pula pangkalan *speed boat* (kapal fiber berukuran 7 GT) di Negeri Tulehu. Begitu pula di Pulau Saparua dan Haruku terdapat lokasi pendaratan *speed boat*, sedangkan kapal besar bersandar di pelabuhan Haria. Pangkalan *speedboat* itulah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Faktor lain yang bersifat eksternal terkait dengan permasalahan pelabuhan adalah kebijakan pengelolaan pelabuhan yang membedakan tempat sandaran kapal berdasarkan

izin operasi yang mengeluarkan. Pada kapal kayu ukuran besar, izin operasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan *speed boat* izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu di Maluku Tengah pemerintah daerah hanya dapat mengelola tempat bersandar kapal *speed boat* yang berukuran kecil, yang sebenarnya tidak layak disebut pelabuhan, melainkan hanya sebagai tempat berlabuh kapal berukuran kecil. Di tempat itu tidak ada sarana bangunan perkantoran, kecuali hanya berupa pos pemungutan retribusi penumpang *speed boat* yang dikelola oleh UPTD Dinas Pelabuhan Kabupaten. Hal itu berbedadengan pelabuhan yang dikuasai pemerintah pusat, yang merupakan kawasan pelabuhan yang memiliki sarana yang lengkap mulai dari tempat bongkar muat, tempat berlabuh, perkantoran dan sarana lain pendukung fungsi pelabuhan.

Pengelolaan pelabuhan tidak hanya pengelolaan dermaga atau sarana dan prasarana pelabuhan yang bersifat fisik tetapi menyangkut keselamatan lalu-lintas pelayaran, sistem navigasi, perizinan kapal yang akan berlabuh atau berlayar dan administrasi bongkar-muat. Hal-hal seperti ini yang oleh pemerintah pusat daerah dianggap belum mampu untuk mengelola pelabuhan. Kewenangan teknis seperti itu belum dimiliki SDM di daerah, sehingga pemerintah pusat belum memberikan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada pemerintah daerah.

Pelayaran rakyat merupakan transportasi laut yang digunakan penduduk untuk menjangkau trayek yang tidak dilakukan oleh kapal berukuran besar. Definisi ini tampaknya sulit diterapkan di

provinsi atau kabupaten yang lokasinya merupakan daerah kepulauan. Di Maluku Tengah, jalur transportasi laut yang menghubungkan pelabuhan Tulehu di Pulau Ambon menuju Pelabuhan Haria di Pulau Saparua tidak hanya dilayani oleh kapal ukuran kecil tetapi juga oleh kapal berukuran besar.

Jika merujuk pada definisi pelayaran rakyat sebagaimana disebut dalam UU Pelayaran, *speedboat* tidak sepenuhnya merupakan bagian dari pelayaran rakyat karena tidak berbahan kayu meskipun berbobot kurang dari 7 GT. Sebagian besar *speedboat* berukuran kecil. Kapasitas tempat duduk hanya untuk 7 penumpang di (Pelabuhan Tulehu) dan 20 penumpang (Pelabuhan ). Meskipun demikian, *speedboat* mampu menyerap tenaga kerja lokal yang cukup besar. *Speedboat* mampu menghidupi rakyat dan melayani transportasi penduduk antar pulau yang belum dijangkau kapal cepat berukuran besar. Sebagian besar pemilik *speedboat* tersebut adalah orang Saparua dan Haruku.

## 2. Pelabuhan Tehoku Negeri Hila

Pelabuhan *speed boat* Tehoku terletak di Negeri Hila. Model angkutan laut yang ada pelabuhan tersebut awalnya juga berupa kapal kayu dengan bobot 7GT dengan kapasitas 100 orang, namun sudah 10 tahun terakhir ini tergantikan oleh kapal modern dari fiber, yaitu *speedboat* 6 GT ke bawah dengan kapasitas 40 orang. Kapal fiber jenis *speed boat* merupakan sarana yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dikelola secara perorangan. Kemunculan jenis *speedboat* ini sudah lama terjadi. Tahun1980-an *speedboat* sudah digunakan untuk

transportasi laut antar pulau di Maluku Tengah. Dibandingkan dengan kapal tradisional, kapal sejenis *speedboat* memang memiliki waktu tempuh lebih cepat dibandingkan kapal kayu.

Jalur transportasi antar pulau yang menghubungkan desa-desa pesisir di pedalaman di Maluku Tegah dan Kabupaten Seram bagian Barat ( SBB). pada umumnya belum terjangkau oleh kapal cepat ukuran besar. Oleh karena itu pelayaran di Maluku cenderung dilayani oleh kapal fiber ukuran kecil (*speedboat* dibawah 6 GT), sebagaimana dapat dilihat pada kegiatan transportasi laut di pelabuhan tehoku. Yaitu pelabuhan rakyat yang melayani tujuan berbagai desa-desa dan dusun – dusun pesisir di Pulau Seram.

Beberapa dusun, yaitu Dusun Telaga, Saluku, Lela, Limboro, Los, Nasiri, Mangge, Lirang, Erang, Melati, Telaga Nifa, Hulung dan Batu Lubang sebenarnya termasuk wilayah Desa Hulu. Akan tetapi, oleh karena jarak dusun berjauhan maka masing-masing dusun mempunyai tempat tambat *speedboat* sendiri-sendiri untuk melayani penumpang yang akan menyeberang ke Ambon atau hanya sampai ke Tahoku negeri Hila. Hal itu menunjukkan bahwa pelayaran rakyat yang bisa menembus setiap dusun di desa-desa pesisir dengan perairan pantai yang dangkal.

Pada saat ini jumlah penumpang *speedboat* semakin berkurang. Selain karena berkurangnya hasil kebun yang akan dibawa ke kota, sebagian penumpang juga beralih ke kapal cepat. Masalah yang timbul adalah kapal cepat yang masuk ke pelabuhan di wilayah pulau Ambon hanya dapat berlabuh di pelabuhan Tulehu. Kapal cepat tidak

dapat masuk ke pelabuhan lain di Pulau Ambon seperti pelabuhan Hila, karena perairan pantai di pelabuhan- pelabuhan tersebut tidak bisa mendukung untuk pendaratan kapal cepat. Selain trayek SBB dari Negeri hila Pelabuhan Tahoku juga melayani kabupaten maluku tengah waitasel ,waiputi, wailapia,la uma,kasawari pelayaran dengan menggunakan *speedboat*. Pendapatan yang didapat pada penjualan tiket masuk ke kas daerah pemerintah kabupaten maluku tengah UPTD Perhubungan, dan pemerintah negeri Hila.

### 3. Labuhan Hitu

Labuhan Hitu, oleh penduduk negeri Hitu disebut Labuhan *Haita Huseka'a*. Nama ini diberikan oleh orang-orang Hitu sejak dahulu. Kata *Haita* artinya Timbul/muncul, sedangkan *Huseka'a* terdiri dari dua suku kata yaitu *Huse* yang berarti Embun, dan *Ka'a* yang berarti Naik. Jadi *Haita Huseka'a* artinya: Dia timbul/muncul seperti Embun yang naik. Labuhan Hitu muncul bersamaan dengan orang pertama yang datang di tanah Hitu pada saat itu, bernama Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah (Yasirullah artinya rahasia Allah). (Wawanvara bersama bapak Salhana Pelu, dan Lamhitu Pelu tanggal 20 Februari 2018).

Saidina Zainal Abidin datang ke tanah Hitu pada abad ke-10, yang menurut cerita turun temurun Raja Hitulama tinggal di Mekkah, kemudian melakukan perjalanan rahasia mencari tempat tinggal untuk anak cucunya. Kelak di kemudian hari, dengan kehendak Allah Ta'ala, ia singgah di suatu tempat yang sekarang bernama Negeri Hitu, tepatnya di *Haita Huseka'a* (Labuhan Hitu). Peristiwa kedatangannya tidak ada yang mencatat hanya berdasarkan cerita turun temurun

(Amrullah dan Bambang, 2016 : 139).

Adapun Perdana Tanah Hitu yang bernama Pattikawa atau Perdana Mulai juga tiba di Tanah Hitu tepatnya di *Haita Huseka'a* pada 1440 malam hari. Dalam bahasa Hitu Kuno disebut *Hasamete* yang artinya: Hitam Gelap Gulita, sesuai dengan warna alam pada malam hari. Perdana ini kemudian mendirikan negerinya di pesisir pantai yang bernama Waipaliti di muara Sungai Wai Paliti. Perdana Pattikawa atau Perdana Mulai berarti orang yang pertama mendirikan negerinya di pesisir pantai. Nama negeri tersebutlah yang menjadi nama soa atau Ruma Tau yaitu Waipaliti dengan marganya Pelu. Marga Pelu inilah yang selalu menjadi penguasa (raja) di negeri Hitu sampai sekarang. (Wawancara bersama bapak Ahmad Pelu tanggal 24 Maret 2018).

Dalam Hikayat Tanah Hitu disebutkan bahwa Hitu muncul sebagai pusat perdagangan secara perlahan-lahan antara 1460-1490. Seperti ditulis oleh Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu menyebutkan mengenai asal-usul kedatangan Empat kaum yang menjadi cikal bakal penduduk Hitu. Keempat kaum itu datang dari tempat yang berbeda, yakni dari Pantai Tenggara Pulau Seram, Tuban, Jailolo (Halmahera), dan juga Gorong di kepulauan Seram bagian timur yang disebut Empat perdana. Hitu muncul sebagai bandar utama di Maluku Tengah pada sekitar awal abad ke-16 bersamaan dengan meluasnya pembudidayaan atau penanaman cengkeh di wilayah tersebut, terutama di Jazirah Huamual di Seram Barat. Hal ini terkait dengan perluasan kekuasaan Ternate ke Maluku Tengah. Cengkih yang semula hanya berada di Maluku Utara, kemudian meluas ke

---

Jurnal Lani:Kajian Ilmu Sejarah & Budaya 85 | P a g e

wilayah Maluku Tengah terutama Pulau Seram. Sebagai Bandar utama di Maluku Tengah, Hitu mempunyai kedudukan yang istimewa karena hubungannya dengan Jepara dan Jawa yang kala itu merupakan Bandar yang cukup ramai di pantai utara Jawa. Jepara merupakan Pelabuhan Kerajaan Demak yang pada saat itu sudah menganut Islam dan merupakan salah satu pusat syiar Islam. Disebutkan bahwa hubungan Ternate dan Hitu dengan Jawa sangat erat. Berkat hubungannya dengan daerah-daerah luar Maluku, Hitu berkembang menjadi Bandar acuan bagi Bandar yang lain di Maluku Tengah seperti Bandar di Seram Timur dan Kepulauan Seram Laut, dan juga Gorong mengacu kepada Hitu (Amrullah dan Bambang, 2016 : 135-137).

M.A.P Meilink-Roelofs (2016: 158) menjelaskan bahwa Hitu menjadi pusat perdagangan cengkeh di Ambon. Namun penduduk Hitu tidak menanam atau memanen cengkeh sendiri. mereka memanen cengkeh sebagai upeti dari tempat-tempat yang lebih kecil yang memiliki hubungan bawahan dengan yang lebih besar dan harus menyediakan komoditas tertentu untuk mereka. setelah adanya budidaya cengkeh yang meluas membuat yang ramai oleh orang Jawa.

Penjelasan diatas juga sebagaimana dijelaskan oleh Endjat Djaenuderajat (ed) (2013 : 307) dalam Atlas Pelabuhan-pelabuhan bersejarah di Indonesia, bahwa pada saat cengkeh mulai ditanam dalam jumlah besar di Maluku Tengah terutama di daerah Hitu dan Jazirah Huamual di Seram, menjadikan Hitu sebagai pusat perdagangan cengkeh yang terkenal sejak awal

abad ke-16. Penanaman cengkeh di wilayah juga ini terjadi bersamaan dengan perluasan kekuasaan kerajaan Ternate ke Maluku Tengah. Pelabuhan Hitu juga sudah lama memiliki hubungan pelayaran dengan pelabuhan Jepara di Jawa. Posisi Hitu kemudian menjadi pelabuhan yang menyalurkan mata dagangan cengkeh dan hasil laut yang dihasilkan dari Seram dan kepulauan Key dan Tanimbar di Laut Aru.

Pada masa kini labuhan Hitu digunakan untuk tempat singgahnya kapal-kapal antar pulau, seperti dari Pulau Seram. Kondisi geografis suatu wilayah akan sangat berdampak pada pengembangan dan pembangunan yang cenderung dipengaruhi oleh karakteristik perbedaan potensi sumber daya dan ketersediaan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing wilayah (Marcus Tukan, 2015 : 3). Karena letaknya yang strategis inilah hingga sekarang Labuhan Hitu tetap terjaga eksistensinya. Sebelum masa kolonial (masa Islam) Labuhan Hitu adalah tempat yang aman untuk perahu-perahu nelayan dan para pedagang Islam dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Makasar, Banda, untuk melakukan transaksi perdagangan. Hal ini berlanjut hingga datangnya bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Belanda yang diterima secara baik oleh masyarakat negeri Hitu, namun karena ketamakan mereka pada akhirnya memperoleh perlawanan dari penduduk negeri Hitu. Bukan saja penduduk Hitu, namun kesadaran bangsa Indonesia akan pedih dan kejamnya kaum penjajah sehingga secara bersama-sama dengan semangat nasionalisme mengusir kaum penjajah dari tanah air tercinta. Pasca kemerdekaan pada tahun 1999

pecah konflik kemanusiaan di Maluku, konflik bermotif keagamaan ini menjadikan Labuhan Hitu sebagai jalur alternatif lintas laut bagi umat Muslim dari negeri Tulehu dan negeri Liang untuk menuju ke kota Ambon, karena pada saat itu belum ada jalur darat (akses jalan raya) dari Liang ataupun Tulehu. Sedangkan pada saat itu untuk menuju ke Ambon harus melewati Negeri Waai dan Passo namun dihalangi oleh umat Kristen. Satu-satunya jalur alternatif untuk menuju ke Ambon adalah dengan menggunakan transportasi Laut seperti Spit dan Perahu ke Labuhan Hitu, dan dari Labuhan Hitu, menggunakan transportasi darat seperti Mobil/Bis menuju ke Ambon. (Wawancara bersama Bapak Ahmat Pelu, tanggal 20 Februari 2020).

Bagi masyarakat negeri Hitu, Labuhan Hitu adalah sebagai akses dari daerah-daerah sekitarnya mulai dari Seram Bagian Barat, Namlea, dan sekaligus menjadi jalur transit dan alternatif jika cuaca laut mengalami gangguan cuaca buruk. Labuhan Hitu merupakan wilayah akses bagi kecamatan Leihitu dalam penggunaannya sebagai jalur bongkar muat barang dan transportasi laut, Kecamatan Leihitu dengan jumlah penduduk 48.624 jiwa mampu menjawab semua tuntutan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, mulai dari aktifitas usaha perdagangan (jual beli) hasil bumi, keperluan kebutuhan pokok, dan aktifitas usaha lainnya. Dengan adanya Labuhan Hitu juga pasar yang terdapat disana turut menunjang perekonomian baik bagi masyarakat Negeri Hitu maupun sebagian orang daerah-daerah lainnya yang menggunakan jasa Labuhan juga pasar di Negeri Hitu baik itu sebagai pedagang, pembeli,

pengguna jasa Labuhan yakni pengemudi dan penumpang transportasi laut. (Wawancara dengan sekretaris Negeri Hitu Lama, Bapak Husen Pelu tanggal 23 Februari 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, diperjelas oleh Gurning dan Budiyanto (2007) bahwa Pelabuhan adalah suatu lokasi yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan teritorial tertentu sebagai tempat berlabuh, bersandar, naik-turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, perkantoran, gudang, terminal, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga pelabuhan juga dikatan sebagai tempat kegiatan layanan ekonomi, kegiatan pemerintahan, social dan pariwisata serta sebagai simpul perpindahan intra dan antar moda transportasi suatu wilayah, berperan untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan perdagangan/perekonomian, yang terdiri atas kegiatan menyimpan, distribusi, pemrosesan, pemasaran dan lain-lain.

### **Eksistensi Pelabuhan bagi Masyarakat Maluku**

#### **1. Pelabuhan Negeri Tulehu**

Secara fisik, Pelabuhan merupakan kawasan yang terbangun di pesisir yang terletak saling berdekatan dari pemukiman penduduk, yang meluas dari pusatnya hingga ke pinggiran Negeri yang berdekatan. Pelabuhan dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri dari wilayah pengaruhnya. Namun pelabuhan tidak menciptakan kegiatan tersebut, melainkan hanya melayani tumbuh dan berkembangnya kegiatan tersebut. Adapun dampak dari keberadaan aktivitas

pelabuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Negeri Tulehu sendiri, diantaranya ditandai dengan semakin bertumbuhnya berbagai jenis kegiatan aktivitas seperti pertokoan, perdagangan, dan lain sebagainya. Pelabuhan yang ada di negeri Tulehu merupakan pelabuhan yang terletak di pulau Ambon, atau tepatnya di kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah. Gunanya sebagai fasilitas untuk melintasi Selat Maluku Tengah yang menghubungkan kota kabupaten dan 2 (dua) kabupaten yang ada di seram dan serta kecamatan yang ada di pulau lease. Secara fungsional Pelabuhan Negeri termasuk rute yang menghubungkan kabupaten yang dalam wilayah provinsi Maluku. Pelabuhan yang berada di Negeri Tulehu merupakan tempat transit penduduk yang melakukan perjalanan dari seram dan lease ataupun sebaliknya. Dengan demikian Pelabuhan Negeri Tulehu merupakan pintu gerbang antar kabupaten dan kecamatan, khususnya Maluku Tengah. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di negeri Tulehu bias juga kita katakan sebagai pelabuhan rakyat sebab dalam pengelolaan pelabuhan yang ada sebahagian dikelola Pemerintah sedangkan lokasi atau tempat dimana pelabuhan di bangun masih dimiliki oleh masyarakat dan Negeri Tulehu dari segi pemanfaatan pelabuhan Rakyat dan dengan kata lain Pelayaran rakyat juga telah berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah pedalaman yang terpencil dan pulau-pulau terluar untuk mendistribusikan barang hasil bumi dan jasa, maupun untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat. Dengan

beroperasinya pelayaran rakyat maka masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan pulau-pulau terluar yang terisolasi telah dipermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan disparitas kesenjangan harga dapat ditekan. Peran pelayaran rakyat ini tidak tergantikan oleh kapal-kapal bertonase besar mengingat kedalaman perairan pantai dan sungai yang semakin dangkal akibat proses sedimentasi yang tidak dapat dikendalikan. Namun perkembangannya, saat ini keberadaan pelayaran rakyat telah terpinggirkan oleh beroperasinya kapal-kapal moderen, serta kebijakan yang menyertainya. Padahal, pelayaran rakyat memiliki peran yang cukup besar dalam memperkuat poros maritim, untuk mewujudkan nawacita. Peran pelayaran rakyat itu antara lain adalah sebagai penguat identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang ditunjukkan oleh adanya simbol-simbol budayamaritim yang tersimpan dalam aktivitas pelayaran rakyat, baik yang terwujud dalam bentuk-bentuk fisik perahu yang digunakan dalam pelayaran maupun dalam sistem organisasi pelayaran, yang masing-masing bercorak khas mewakili tradisi budaya maritim di setiap daerah.

Pelabuhan Tulehu sebagai pelabuhan penumpang adalah pelabuhan yang dibangun untuk memberikan fasilitas bagi kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, pada pelabuhan penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang sangat sederhana namun telah memberikan kontribusi besar kepada pelaku perjalanan dari atau sebaliknya, Pelabuhan tersebut tentunya memberikan peranan yang besar terhadap

kelancaran lalu lintas orang dan perdagangan antar pulau. Hal ini sudah ada sejak lama dan meningkat, bahkan telah menurun dengan hadirnya kapal-kapal yang lebih modern dengan kapasitas penumpang yang sangat besar dalam melayani jasa penumpang serta hasil-hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan serta kebutuhan pokok lainnya.

Dilihat dari lalu lintas barang dan orang yang terjadi pada pelabuhan ini, maka wilayah hinterland pun ikut berkembang meliputi berbagai wilayah disekitarnya yaitu kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Hal ini dibuktikan juga dengan meningkatnya prasarana yang ada di Desa-desa yang bertetangga jaringan jalan, listrik, drainase dan telekomunikasi. Oleh karena itu keberadaan Pelabuhan Tulehu ini membawa efek pengganda bagi tumbuhnya sektor lainnya, seperti sektor perdagangan dan jasa turut mengalami peningkatan. Begitu pula dengan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas sosial lainnya sejalan dengan penambahan penduduk akibat migrasi pekerja sektor lainnya. Aktivitas Pelabuhan Tulehu yang terlihat dalam kurun waktu 5 tahun (2015 – 2020) menunjukkan bahwa tingginya volume aktivitas pelabuhan berdampak langsung terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar.

## **2. Pelabuhan Tehoku**

Pelabuhan yang terletak di Tehoku ini mulai beroperasi sejak awal tahun 2000-an ini seiring dengan berlansungnya konflik di Ambon hingga sekarang masih beroperasi bahkan mengalami perkembangan yang pesat terbukti dengan bertambahnya kapal-kapal yang sandar di

pelabuhan ini, bertambahnya fasilitas pelabuhan, dan bertambahnya pertokoan yang berdiri disekitar pelabuhan sebagai pendukung keberadaan pelabuhan tersebut. Keberadaan pelabuhan ini memudahkan akses masyarakat dari kabupaten Seram Bagian Barat terutama dataran Huamual menuju Pulau Ambon dan sekitarnya. Dengan adanya pelabuhan tehoku ini memperpendek jalur akses yang biasanya harus dari Pelabuhan Hitu maupun melewati pelabuhan ASDP Liang- Kairatu. Dengan memperpendek jalur secara otomatis memperpendek waktu yang digunakan dalam perjalanan sehingga masyarakat bisa memepuh perjalanan pulang pergi dalam waktu 1 hari, tidak perlu menginap lagi di Pulau Ambon jika berurusan di kota Ambon.

## **3. Labuhan Hitu**

Labuhan Hitu pada awalnya hanya merupakan labuhan lepas pantai sebagai tempat berlabuhnya perahu-perahu baik itu perahu para nelayan Hitu maupun perahu-perahu dari daerah sekitarnya yang singgah di Hitu. Ketika para pedagang asing mulai berdatangan untuk mencari rempah-rempah, Labuhan Hitu akhirnya dibentuk oleh masyarakat Hitu dengan menggunakan kayu, sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal para pedagang. Pada saat kaum kolonial menduduki Hitu, Labuhan Hitu pun disesuaikan dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Hingga pasca kemerdekaan pada tahun 1974 Labuhan Hitu mendapat perhatian pemerintah sehingga dibangunlah fisiknyanya dan mulai diawasi oleh Dinas Perhubungan Maluku hingga saat ini.

Keberadaan Labuhan hitu yang sudah lama ini merupakan asset bagi negeri untuk

pertumbuhan negeri karena ada retribusi untuk negeri dari keberadaan labuhan ini walaupun pengelolaannya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah. Eksistensi pelabuhan hingga sekarang inilah membuat arti pelabuhan ini sangat penting bagi masyarakat di negeri itu sendiri maupun masyarakat di Pulau Seram yang memilih Labuhan Hitu sebagai tempat berlabuhnya.

Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan juga merupakan daya tarik labuhan hitu disamping letaknya yang strategis di pulau Ambon. Penambahan sandaran untuk kapal, serta fasilitas lainnya yang semakin modern dan meningkat membuat labuhan hitu bisa memenuhi kebutuhan kapal dan masyarakat yang berlabuh di sana. Ditambah lagi dengan penyediaan transportasi lanjutan menuju kota ambon yang mudah di akses membuat labuhan Hitu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Pulau Seram.

#### D. Simpulan

Pelabuhan-pelabuhan tradisional di Pulau Ambon diantaranya Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Hitu dan Pelabuhan Tehouku merupakan pintu gerbang Pulau Ambon bagi masyarakat di Pulau Seram, Manipa, Kelang, Buano, Leasae dan Banda. Keberadaan mereka yang sudah lama membuat pelabuhan-pelabuhan ini sudah dikenal bagi masyarakat Maluku. Peningkatan fasilitas pelabuhan oleh masyarakat dan pemerintah negeri maupun pemerintah daerah mengakibatkan pelabuhan tersebut selalu eksis digunakan oleh masyarakat diantaranya sandaran kapal, sarana ruang tunggu, pertokoan, sarana transportasi darat, dan lain sebagainya

Eksistensi Pelabuhan-pelabuhan tradisional

atau rakyat di Pulau ambon menciptakan mobilisasi masyarakat dari pulau-pulau sekitar Pulau Aambon menjadi lebih tinggi. Hal ini menciptakan perkembangan pelabuhan tradisional semakain baik, karena mulai diperhatikan oleh dinas terkait terutama Dinas Perhubungan. Dengan peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelabuhan tersebut.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung, (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Abdurrahman Paramitha. Leirissa, R.Z. Luhulima, C.P.R, (1973). *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Amal Adnan .M. (2009). *Portugis Dan Spanyol Di Maluku*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Amrullah, Amir dan Budi Utomo Bambang, (2016). *Aspek-Aspek Perkembangan Peradaban Islam Di Kawasan Indonesia Timur, Maluku dan Luwu*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bartels Dieter. (2017). *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Muslim Kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah Jilid II : Sejarah*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Binnendyk Eudoxia dan Pusparani Rina, (2015). *Dasar-dasar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pensil komunika.
- Djaenuderajat Endjat, (2013). *Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gultom Elfrida, (2007). *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamid Abd Rahman dan Madjid .S. Muhammad, (2011). *Pengantar Ilmu sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirdjo sartono, (1993). *Pendekatan Ilmu*

- Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keuning. J. TT. *Ambonnezen, Portugezen En Nederlanders, Ambon's Geschiedeni Tot Het Einde van de zeventiende Eeuw*. Terjemahan: Frans Rijoly.
- La Raman dkk, (2016). *Dari Pelabuhan Monopoli Menuju Kota Pelabuhan Bebas: Sejarah Kota Pelabuhan Ambon Tahun 1500-1942*. Ambon: Balai Pelestarian Nilai Budaya
- Leirissa, R.Z. (1997). "Ternate Dalam Jalur Sutra" (Makalah) Seminar: Membangun Kembali Peradaban Bahari. Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (1996). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*. Jakarta : Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_.(1975). *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- Marindano, Djoko dan Kanumoyoso, Bondan. (2016). *Rempah, Jalur Rempah, Dan Dinamika Masyarakat Nusantara*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poelinggomang L. Edward, (2012). *Sejarah Maritim Dunia (Bahan Ajar)*. Makassar. Universitas Hasanuddin : Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan.
- Pusparani Rina dan Nanlohy, (2016). *Dinamika Kehidupan Masyarakat Pesisir di Negeri Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah*. "Penelitian Dosen Muda". Ambon: FKIP Universitas Pattimura.
- Roelofsz, Meilink M.A.P. (2016). *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara Sejarah Perniagaan 1500-1630*. Depok: Komunitas Bambu.
- Rumphius .G.E, TT. *D'Ambonsche Land Beschrijving, mms (1687), Rijksar- Chief, s Gravenhage*. Terjemahan: Frans Rijoly.
- Soplantila H.M, Soplantila A.L, Matrutty F.F.H, Anakotta J.J. (1992). *Pola Penguasaan, Pemilikan, Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*. Ambon: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Thalib Usman, (2014). *Sejarah Maritim (Modul)*. Ambon: FKIP Universitas Pattimura.
- Tukan marcus, (2015). *Pelabuhan Berbasis Model ekonomi kepulauan*. Surabaya: Unesa University press.
- Witjaksono, (2017). *Reborn Maritim Indonesia Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi*. Jakarta: PT. Adhi Kreasi Pratama Komunikasi.